

**ISLAM IDEOLOGI KAUM TERTINDAS:
COUNTER HEGEMONY KAUM MARGINAL
DAN MUSTAD'AFÎN**

Lukman S. Thahir

STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu
e-mail: Lukmanst65@yahoo.com

Abstract

Islam is perceived as being not only a new religion by some writers of history, but also as a liberating force. The teaching of Islam—the main source of which is the Qur'an—contains a lot of teaching on liberation the oppressed from the oppressors. The Qur'an even firmly expresses that the Prophet Moses was sent to liberate the oppressed from despotic ruler (Pharaoh). In this context, Islam appears as an ideology that can be employed to liberate the oppressed from the despotic power.

لم يكن الإسلام يعتبره كثير من الباحثين ديناً جديداً فحسب، وإنما يعتبرونه أيضاً قوة محررة لأمة الإنسانية. وقد أثبتت الدراسة العميقة للقرآن العظيم أن كتاب الله ينحاز إلى الطبقة الضعيفة من المجتمع (المستضعفين) في مواجهة الطبقة القوية منه (المستكبرين)، وقد وصف القرآن كل الرسل الذين أرسلوا من بنى إسرائيل بأنهم يدافعون عن المستضعفين ضد المستكبرين و الذين هم أصحاب الأموال و المناصب في حكومة. لذلك وصف القرآن نبيه موسى عليه السلام بأنه منقذ للمستضعفين عن الجرائم أعمال العنف من فرعون صنديد الإستكبار في عصره. فكان نصر الله حقاً للمستضعفين.

Kata Kunci: Islam, ideologi, kaum tertindas, kaum marginal

PENDAHULUAN

Ada dua dasar pemikiran mengapa tulisan ini mengambil topik seperti di atas. *Pertama*, disamping berangkat dari keinginan terwujudnya suatu bentuk gerakan tamaddun masyarakat sipil untuk membebaskan kaum lemah, dan ini hanya bisa termanifestasi bila ada *counter hegemony* terhadap sistem dan *weltanschauung* yang dominan saat ini, yaitu Neo-Liberalisme yang telah mengakibatkan marginalisasi orang miskin kota dan desa serta dehumanisasi kaum *mustad'afin*; *kedua*, mengindikasikan perlu adanya gagasan hegemoni tandingan terhadap hegemoni dominan, yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan elemen sosial lainnya dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan ideologis dan politik. Untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut, perlu dibangun sebuah gerakan sistemik-epistemologis atau kelompok intelektual organik yang secara sadar dan kritis tidak hanya memahami benar geneologi terjadinya akar penyebab marginalisasi kelompok *mustad'afin*, tetapi sekaligus membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*) atas segala bentuk penindasan. Untuk maksud tersebut, pertama-tama akan dijelaskan akar penyebab munculnya berbagai bentuk dehumanisasi peradaban manusia modern, lalu kemudian dibangun sebuah sistem peradaban yang berpihak pada kepentingan kaum marginal dan *mustad'afin*.

GENELOGI DEHUMANISAS PERADABAN MANUSIA MODERN

Dehumanisasi peradaban modern berawal dari pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan yang terwujud dalam pemisahan teori dan praxis.

Pada awalnya, dalam pemikiran Yunani Purba, pengetahuan tidak dipisahkan dengan kehidupan kongkrit manusia. Ini bisa dilihat pada konsep *bios theoretikos*, suatu bentuk kehidupan, suatu "jalan" untuk mengolah dan mendidik jiwa dengan membebaskan manusia dari perbudakan oleh *doxa* [pendapat] dan dengan jalan itu manusia mencapai otonomi dan kebijaksanaan hidup. Kata "*theorea*" berasal dari tradisi keagamaan dalam kebudayaan Yunani kuno. "*Theoros*" adalah seorang wakil yang dikirim oleh *polis* untuk keperluan ritus-ritus keagamaan. Di dalam perayaan-perayaan itu, orang ini

melakukan *theoria* atau “memandang” ke arah peristiwa-peristiwa sakral yang dipentaskan kembali dan dengan jalan itu ia berpartisipasi di dalamnya. Melalui teori sekaligus ia mengalami emansipasi dari nafsu-nafsu rendah. Di dalam istilah Yunani, pengalaman itu disebut “*catharsis*”, yaitu pembebasan diri dari perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan fana yang berubah-ubah. Dengan demikian, dalam pemahaman primitifnya, *teori memiliki kekuatan emansipatoris* (Shapiro, 1971:301-317; Hardiman, 2004:18).

Bersamaan dengan munculnya filsafat di Yunani, teori mulai dipisahkan dengan praktek. Dengan mengartikan teori sebagai kontemplasi atas kosmos, filsafat telah menarik garis batas antara *ada* dan *waktu*, yaitu antara yang tetap dan berubah-ubah. Inilah bibit cara berpikir yang menyebabkan lahirnya ontologi dalam sejarah pemikiran manusia. Dengan konsep seperti ini, para filosof berkeinginan untuk menerapkan pemahaman konseptual itu pada berbagai situasi. Artinya, teori harus dimurnikan dari unsur-unsur yang berubah-ubah, yaitu dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan subjektif manusia sendiri. Dengan sikap itu, manusia dapat memahami kenyataan sebagaimana adanya. “kontemplasi atas kosmos” kemudian menjadi “kontemplasi bebas kepentingan”. Oleh karena itu, refleksi ontologis adalah suatu *disinterested knowledge*.

Dalam diskursus filsafat modern, pembersihan teori dan kepentingan berlangsung dalam dua jalur. Pada jalur yang pertama, para filosof yang mengutamakan kemampuan rasio manusia menganggap pengetahuan murni dapat diperoleh melalui rasio manusia sendiri. Menurut pendukung teori ini, pengetahuan sejati dapat diperoleh dalam rasio sendiri dan bersifat *apriori*. Pengetahuan *apriori* semacam itu dapat disebut pengetahuan transendental karena mengatasi pengamatan empiris yang bersifat khusus dan berubah-ubah. Pengetahuan manusia dipandang universal dan *transhistoris*. (Representasi dari pemikiran filsafat rasionalisme ini ialah Rene Descartes, Spinoza, Leibniz, dan sebagainya). Pada jalur kedua, para filosof yang mementingkan peranan pengalaman empiris menganggap pengetahuan murni semacam itu bisa diperoleh hanya lewat pengamatan empiris terhadap objek pengetahuan. Pengetahuan sejati menurut pendukung teori ini dapat diperoleh hanya lewat pengamatan empiris dan karenanya bersifat *aposteriori*, pengetahuan diperoleh melalui evidensi pengalaman inderawi (Representasi dari aliran ini

Hobbes, Locke, dan Hume). Kedua aliran ini, meskipun berbeda pangkal perolehan pengetahuan, keduanya sama-sama berkeyakinan bahwa suatu teori murni mungkin diperoleh dengan jalan membersihkan pengetahuan dari dorongan-dorongan dan kepentingan-kepentingan manusiawi.

Puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan ini adalah munculnya paham positivisme yang dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857). Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta objektif sebagai pengetahuan yang sah. Awalnya, konsep demikian melahirkan sosiologi, ilmu-ilmu pengetahuan sosial, yang oleh Comte dianggap berada pada titik kulminasi perkembangan berbagai disiplin ilmiah, puncak perkembangan positivisme sendiri. Belakangan, positivisme bukan sekedar pandangan positivistic mengenai ilmu pengetahuan, melainkan jauh lebih luas lagi, positivisme sebagai “cara berpikir” yang menjangkiti kesadaran masyarakat Barat modern dan masyarakat bangsa-bangsa dunia ketiga, terutama lewat paradigma ilmu sosial positivistiknya. Paradigma sosial positivisme ini meyakini bahwa ilmu-ilmu sosial harus dikembangkan menuju sikap “ilmiah”, yaitu ilmu sosial haruslah objektif, berjarak, bebas nilai, dan bersifat universal. Karena itu, tugas utamanya adalah memberi makna realitas sosial serta melakukan “rekayasa sosial” menuju masyarakat yang dicita-citakan oleh ilmuan ke arah terciptanya suatu tatanan sosial yang berpijak pada keseimbangan sosial, stabilitas sosial dan harmoni sosial (Faqih, 2002:29).

Budiman (2000:18) mengemukakan bahwa paradigma ilmu sosial demikian, dalam diskursus teori pembangunan dunia ketiga, dikenal dengan istilah paradigma teori modernisasi. Menurut teori ini, kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ketiga disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat dalam negeri yang bersangkutan, yaitu faktor budaya mentalitas manusianya, meminjam istilah Inkeles dan Smith. Oleh karena itu, jika bangsa-bangsa dunia ketiga ingin melepaskan diri dari persoalan kemiskinan dan keterbelakangannya, maka sebagaimana teori modernisasi Inkeles, mentalitas mereka harus diubah dari mentalitas tradisional ke mentalitas modern (Inkeles & Smith, 2000:302).

Konstruksi paradigma seperti ini, jika dilacak dasar asumsi dari teorinya adalah bersumber pada “paradigma dominan-tradisional” atau paradigma *equilibrium*. Paradigma ini didasarkan pada asumsi bahwa pada dasarnya watak masyarakat adalah damai dan harmonis. Perubahan sosial oleh karenanya tidak perlu melalui perubahan struktur dan transformasi akan tetapi melalui reformasi. Di sini, bukan sistem dan struktur yang dipertanyakan, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor *given*, dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Yang dipertanyakan justru manusianya. Ketika menyoal mengapa golongan miskin tertinggal, misalnya, paradigma ini beranggapan bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh salah mereka sendiri. Artinya, jika sistemnya sudah memberikan kesempatan yang sama, namun golongan miskin tidak mampu bersaing dan kalah, maka yang perlu disalahkan adalah golongan miskin itu sendiri (Faqih, 2002:36).

Model paradigma demikian, yang hanya membuat dan mengarahkan masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang dianggap sudah benar, tidak hanya berorientasi pada kepentingan *elite* kekuasaan, tetapi juga sekaligus menindas dan bersifat eksploitatif, karena masyarakat cenderung disalahkan atau dijadikan korban. Tidak banyak yang tahu, bahwa teori modernisasi atau pembangunan yang “mirip agama baru”, yaitu menjanjikan harapan baru untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga, ternyata telah gagal memenuhi janji mereka mensejahterakan rakyat di Dunia Ketiga. Yang terjadi sebaliknya, pembangunan telah membawa dampak negatif, di antaranya, pembangunan telah melanggengkan pengangguran, menumbuhkan ketidakmerataan serta menaikkan kemiskinan absolut.

Menyadari kondisi objektif dehumanisasi ini, tugas kita atau tugas para kaum intelektual organik, meminjam istilah Gramsci, dalam memahami teori sosial, pada dasarnya tidak sekedar memberi makna terhadap suatu realitas sosial sehingga memungkinkan lahirnya kesadaran dan pemahaman terhadap suatu realitas sosial, tetapi teori sosial juga bertugas “mengubah realitas sosial yang dianggapnya eksploitatif dan tidak adil. Karena itu, dalam upaya meng-*counter* hegemoni teori-teori sosial positivistik yang menindas dan eksploitatif, perlu dirumuskan teori-teori sosial yang bercorak

kritis dan emansipatoris –sebagai antitesa atas hegemoni teori dominan.

IDEOLOGI KAUM MARGINAL DAN *MUSTADH'AFIN*

Istilah ideologi di sini, tidak diartikan sebagai sebuah sistem ide yang terlepas dari ruang dan waktu, fantasi perorangan, berada di luar aktivitas praktis manusia, melainkan ideologi dalam pengertian Gramsci, yaitu ideologi organik yang bersifat historis (*historically organic ideology*), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu, yang mengatur manusia, dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya. Ideologi dalam pengertian ini, terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat atau ekuivalen dalam “agama dalam pengertian sekuler, satunya pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku” (Simon, 1999:83-85).

Praktek ideologi mempunyai agen-agennya sendiri dalam bangunan kaum intelektual yang mana mereka itu mengkhususkan diri dalam menjabarkan ideologi-ideologi organik dan mengemban tugas melaksanakan reformasi moral dan intelektual. Oleh karena itu, setiap kelas yang mempunyai kedudukan penting menciptakan satu atau lebih strata kaum intelektual yang sadar akan peranannya, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam lapangan politik dan sosial. Dengan demikian, kelas pekerja atau kelompok *mustad'afin*, misalnya, juga harus menciptakan kaum intelektualnya sendiri jika mereka ingin berhasil membangun hegemoni tandingan.

Tugas kaum intelektual ini tidak hanya membuka selubung ideologis hegemoni dominan yang eksploitatif dan menindas kaum *mustadhafin*, tetapi juga sekaligus merekonstruksi kesadaran kritis untuk senantiasa mempertanyakan setiap diskursus dominan maupun melakukan aksi konter terhadap hegemoni dominan yang dalam formasi sosial saat ini, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga, terutama di Indonesia, termanifestasi dalam *mainstream developmentalisme*. Untuk membongkar selubung ideologis tersebut, kaum intelektual *mustad'afin* memerlukan seperangkat sistem berpikir yang oleh kelompok mazhab Frankfurt, terutama lewat Habermas, dikenal dengan paradigma ideologi kritis. Paradigma ideologi kritis ini pada dasarnya adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis.

Sebagai contoh, untuk membongkar selubung ideologis teori-teori sosial dengan paradigma teori modernisasi yang bersifat eksploitatif dan represif, maka teori dependensia –sebagai salah satu dari model teori-teori sosial kritis—merupakan sebuah keniscayaan bagi kaum intelektual *mustadī'afīn*. Menurut asumsi teori ini, keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat dunia ketiga, bukan karena faktor internal, yaitu faktor mentalitas, tetapi lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu akibat dari struktur perekonomian yang bersifat eksploitatif, di mana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah (Budiman, 2000:18) Di sini, keterbelakangan dan kemiskinan bagi penganut teori ini bukanlah masalah dan penyebab, akan tetapi merupakan akibat dari ketidakadilan hubungan antara dunia maju dan dunia ketiga yang berwatak imperialisme. Karena itu, untuk melakukan perubahan masyarakat, maka menurut teori ini tidak mungkin dapat dicapai melalui perubahan sikap mental dari orang miskin dan masyarakat terkebelakang, selama struktur dan hubungan antara yang maju dan terkebelakang masih dalam hubungan yang tidak adil dan menghisap (Faqih, 1998:168). Sebagai contoh, mengapa hubungan yang tidak adil dan menghisap dari dunia maju ke dunia terbelakang, bangsa-bangsa dunia ketiga menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan atau mengapa negara-negara yang menjadi korban imperialisme (negara-negara kapitalisme pinggiran) tidak bisa mengembangkan dirinya, berbeda dengan kapitalisme di negara-negara pusat?. Menurut Barran (dalam Budiman, 2002:57), untuk menyebutkan analisis salah seorang pendukung teori ini, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga syarat. *Pertama*, meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dan pedesaan *kedua*, meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta; dan *ketiga*, mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah.

Sementara yang terjadi di negara-negara pinggiran, demikian lanjut Barran, justru sebaliknya. Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat dari dunia Barat ke negara-negara Dunia Ketiga membuat *surplus* yang terjadi di sana diambil oleh kaum

pendatang melalui berbagai macam cara. Akibatnya, yang terjadi di negara-negara pinggiran bukanlah akumulasi modal, melainkan penyusupan modal. Inilah yang terjadi pada bangsa-bangsa Dunia Ketiga, perdagangan dunia yang bebas justru merupakan wadah praktek eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini oleh Blomstroem dan Hettne (dalam Budiman, 2001: 42) diibaratkan sebagai persaingan antara dua tim sepak bola. Tim yang sukses dan lebih kaya, pada akhirnya akan membeli pemain-pemain terbaik dari tim yang lemah. Akibatnya, tim yang lemah bukan saja dikalahkan dalam persaingan, tetapi juga akan terus mundur dan akhirnya hancur, karena unsur-unsur yang paling potensial bagi tim ini untuk maju direbut oleh tim yang lebih kuat.

Kasus yang menimpa bangsa Indonesia saat ini merupakan contoh konkret bagaimana sistem dan struktur sosial yang menindas telah mengakibatkan bangsa ini mengalami krisis multidimensi. Bergulirnya kekayaan hanya di tangan sekelompok kaum kapitalis pusat dalam hal ini para pemilik Lembaga-Lembaga Finansial Internasional, *International Financial Institutions* (IFIs), seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*), dua organisasi yang paling berkuasa di abad XX- maupun di tangan kapitalis pinggiran, seperti para konglomerat lokal dan kelompok Borjuis lainnya, telah memarjinalkan jutaan penduduk miskin di Indonesia dan menciptakan ketidakseimbangan sosial yang berdampak pada terjadinya berbagai konflik dan tindakan anarkis di tanah air.

Untuk lebih jelasnya masalah ini, mari kita lihat analisis Josep Stiglitz (www.yahoo.com 1-4) mantan kepala tim ekonomi Bank Dunia dan IMF, mengenai empat program lembaga finansial tersebut; dua di antaranya disebutkan di sini adalah langkah pertama, program privatisasi, yang menurut Stiglitz lebih tepat disebut sebagai program "penyuapan". Pada program ini, perusahaan-perusahaan milik negara penerima bantuan IMF harus dijual kepada swasta dengan alasan untuk mendapatkan dana tunai segar. Pada tahapan ini, dapat dilihat bagaimana mata para pejabat keuangan di negara penerima bantuan terbelalak, tatkala mengetahui prospek pemberian 10% komisi beberapa milyar dolar yang akan dibayarkan langsung ke rekening pribadi yang bersangkutan di suatu bank Swiss, yang diambilkan dari harga penjualan aset nasional mereka tadi. Setelah program

”penyuapan”, langkah kedua IMF dan Bank Dunia adalah Liberalisasi Pasar Modal atau lebih tepat disebut ”Daur Uang Panas”. Dalam teorinya, deregulasi pasar modal memungkinkan modal investasi keluar masuk, namun dengan ditingkatkannya pemasukan modal investasi dari luar, pada gilirannya akan menyebabkan pengurasan cadangan devisa negara yang bersangkutan. Malangnya lagi, kata Stiglitz, dalam kasus Indonesia dan Brazil, modal itu hanya keluar dan keluar tidak pernah balik. Kebijakan deregulasi ini mengakibatkan dihentikannya subsidi pada bidang-bidang kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, seperti pangan, pendidikan dan bahan bakar, minyak tanah atau BBM. Hasilnya bisa diprediksi, suku bunga yang tinggi menghancurkan nilai properti, memangsa produksi industri, penutupan pabrik-pabrik karena tidak cukup modal, dan mengeringkan dana nasional.

Pascaruntuhnya Soviet, Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya Negara Adidaya. Kenyataan ini direspon secara berbeda-beda oleh negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas penganut Islam. Arab Saudi dan Kuwait yang selama ini dipandang sebagai poros dunia Islam secara tegas menyatakan dukungannya. Sebaliknya, negara-negara Islam lain seperti Iran dan Suriah menentanginya. Indonesia, terkesan malu-malu dalam menentukan sikap. Di satu sisi menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap beberapa kebijakan luar negeri AS, di sisi lain ingin tetap memelihara hubungan baik antara keduanya sebagaimana yang terjalin selama ini.

Bagi masyarakat dunia, khususnya Islam, ambisi AS yang ingin tetap menjadi penguasa tunggal dunia seharusnya disikapi secara serius. Misalnya antara lain mempertanyakan apakah ambisi AS tersebut membawa kemaslahatan atau membawa kemudharatan. Apakah keinginan AS yang demikian memberikan kontribusi bagi terciptanya tata hubungan dunia yang harmonis, seimbang dan berkeadilan, atau sebaliknya, represif dan imperialistik.

ISLAM IDEOLOGI KAUM TERTINDAS-MUSTAD[□]’AFÎN

Untuk menutup tulisan ini, menarik untuk didiskusikan buku Susan George, *How the Other Half Dies: The Real Reason for World Hunger*. Bagaimana mungkin setengah penduduk bumi mati?; Apa

penyebab sebenarnya dari kelaparan di dunia sekarang ini? Kelaparan tidak ada hubungannya dengan kelebihan penduduk, kata Susan. Karena kelaparan terjadi di Bolivia dengan kepadatan penduduk lima orang per kilometer per segi, di India dengan kepadatan 172 orang, tetapi tidak terjadi di negeri Belanda dengan kepadatan 326 orang per kilometer per segi. Dengan demikian, penyebab utama kelaparan dan kemiskinan, adalah ketimpangan sosial dan ekonomi –karena adanya sekelompok kecil orang-orang elit yang hidup mewah di atas penderitaan banyak orang. Negara-negara maju yang menciptakan kebergantungan negara-negara berkembang dan mengeruk keuntungan lewat kolaborasi dengan elit lokal inilah, kata Susan lebih lanjut, yang mengakibatkan masyarakat menjadi miskin dan kelaparan atau menjadi kelompok *mustad'afin*.

Banyak orang mengira bahwa dakwah sudah berakhir setelah khotbah di masjid, setelah menyuruh orang berbuat baik, setelah melarang yang munkar. Selama ini pengajian-pengajian sudah berhasil kalau masjid sudah penuh dengan pengunjung, sudah bertebaran ke seluruh kampung. Padahal pada saat yang sama, di gubuk-gubuk reyot, gelandangan merintih. Di tempat lain, banyak orang Islam tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya, sementara tidak sedikit wanita yang terpaksa mengorbankan kehormatannya untuk memelihara “selembar nyawa” yang dimilikinya.

Islam, tidak saja dianggap sebagai agama baru oleh banyak penulis sejarah, melainkan juga *liberating force*, suatu kekuatan pembebas umat manusia. Kajian yang seksama menunjukkan bahwa Alquran berpihak pada posisi orang-orang yang lemah (*mustad'afin*) dalam menghadapi orang-orang yang kuat (*mustakbirin*). Semua nabi Israel digambarkan dalam Alquran sebagai pembela *mustad'afin* menghadapi *mustakbirin*, yaitu orang-orang kaya dan penguasa satu negeri. Oleh karena itu, Musa digambarkan sebagai pembebas orang-orang yang tertindas dari penindasan Firaun, tokoh *mustakbirin*. Simpati Tuhan pun ditujukan kepada orang-orang yang tertindas. “Dan kami hendak memberi karunia bagi orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi (Q.S Al-Qas'as (28):5).

Mustakbirin dalam bahasa Alquran adalah orang kafir sejati, sementara *mustad'afin* adalah orang mukmin sejati. Orang kafir yang sesungguhnya adalah orang-orang yang arogan dan penguasa

yang menindas, merampas, melakukan perbuatan-perbuatan salah dan tidak menegakkan yang makruf, tetapi sebaliknya membela yang munkar. Sebaliknya orang mukmin sejati, bukan mereka yang hanya mengucapkan kalimat sahadat, tetapi juga mereka yang menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas dan lemah, yang tidak pernah menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka atau menindas orang lain atau memeras tenaga orang lain, yang menegakkan kebaikan dan menolak kejahatan.

PENUTUP

Islam menentang keras perlakuan sewenang-wenang terhadap kaum lemah. Oleh karena itu, Islam yang mengatur hubungan Allah dengan hamb dan hubungan manusia dengan sesama manusia, harus ditampilkan sebagai ideologi pembebas bagi kaum lemah dari cengkeraman kaum penindas dan penguasa yang zalim. Dengan demikian, masyarakat islami tidak memberikan tempat bagi penindasan dan pemerasan terhadap yang lemah oleh yang kuat. Perjuangan orang-orang *mustad'afin* akan terus berlangsung melawan mereka yang berkuasa dan arogan atau kelompok *mustakbirin*, selama mereka melakukan penindasan terhadap kaum lemah (*mustad'afin*). Hal ini sesuai dengan perintah melakukan perbuatan makruf dan mencegah perbuatan munkar dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif. 2000 *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- _____. 1998. "Mencari Teologi untuk Kaum Tertindas", dalam H. Aqib Suminto, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 Tahun Harun Nasution*. Jakarta: LSAF.
- Habermas, Jurgen. 1971. *Knowledge and Human Interest*. Terjemahan oleh Jeremi J. Shapiro. Boston: Beacon Press.
- Hardiman, Francisco Budi. 2004. *Kritik Ideologi Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Buku Baik.
- Inkeles, Alex & Smith, David. 1974. *Becoming Modern, Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pakguruonline: Message: Pembentukan Tata Dunia Baru (Novus Ordo Seclorum) Melalui Kekuasaan Keuangan., (online), (<http://>

groups.yahoo.com/group/pakguruonline/message/2500, diakses
29/12/2008)

Simon, Roger. 1999. *Gramsci's Political Thought*. Terjemahan oleh
Kamdani, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: INIS.